

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi tersebut, ditemukan 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sudrajat, 2010: 1).

Kualitas pendidikan di Indonesia kurang memuaskan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2011) dalam *Education For All(EFA) Global Monitoring Report 2011* yang diberitakan Kompas tentang peringkat Indeks pembangunan pendidikan di Indonesia, bahwasanya Indonesia menempati urutan ke 69 dari 127 negara di dunia. Menurut Survei *Political and Economic Risk Consultant (PERC)*. Dari data ini dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia kurang memuaskan (Hakim, 2010: 1).

Berbagai permasalahan yang mendasar yaitu: pertama kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. Pemerintah kurang tanggap terhadap pendidikan di Indonesia. Begitupun juga dengan para pelajar Indonesia sendiri, rusaknya moral anak bangsa yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan SDM bagi Indonesia. Dan juga para guru yang kurang memperhatikan kondisi dan moral anak didiknya. Kebanyakan guru hanya menyampaikan pelajaran saja, tidak memperhatikan perilaku anak didiknya. Sehingga anak didiknya pun jadi terbengkalai. Kedua, masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, dan sebagainya (Rismaya, 2010: 1).

Merosotnya mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusianya, infrastruktur, sarana prasarana, birokrasi, lingkungan, serta perangkat dan penegakan hukum. Salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (*work performance*) yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru. Siapapun sependapat bahwa guru itu memegang peranan yang amat penting

dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan (Danim, 2006: 66).

Mutu dan profesionalitas guru merupakan tantangan utama pendidikan nasional. Menurutnya, sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru belum meningkatkan mutu dan profesionalitas mereka. Ada banyak kendala yang menyebabkan peningkatan mutu dan profesionalitas ini tidak berhasil dicapai. Salah satunya yakni masalah motivasi belajar guru yang rendah. Guru tidak memiliki motivasi belajar. Seolah-olah, guru itu bertugas mengajar siswa dan melupakan belajar untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Padahal kalau berani mengajar, maka guru harus berani belajar. Melemahnya motivasi belajar ini berimplikasi pada apatisme dalam pembelajaran. Hal ini dipicu oleh sistem pembelajaran yang berpusat pada ancaman kelulusan, melalui ujian nasional. UN melemahkan sistem pembelajaran bermutu. Guru jadi malas berinovasi dan kreatif (Sirait, 2012: 1).

Guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai peran sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan organisasi lembaga pendidikan. Guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Guru juga sebagai pemimpin generasi muda, maka masa

depan generasi muda terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa (Usman, 2008: 48).

Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikan terutama yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Tanpa adanya peran guru maka proses belajar mengajar akan terganggu bahkan gagal. Oleh karena itu dalam manajemen pendidikan peranan guru dalam upaya keberhasilan pendidikan selalu ditingkatkan, kinerja atau prestasi kerja guru harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global. Guru merupakan ujung tombak dari pendidikan multikultur. Peran guru sangat menentukan dalam keberhasilan mendorong pemahaman lintas budaya pada peserta didik. Apa yang disampaikan guru, cara guru mengajar, dan kepribadian guru sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran (Syah, 2008: 36).

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, diperlukan guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas adalah guru yang profesional dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Guru yang profesional mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran. Untuk itu seorang guru yang profesional harus menguasai bahan ajar, memahami karakteristik peserta didik, dan terampil dalam memilih metode pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran (Mardapi, 2010: 3).

Konsekuensi dari guru yang profesional adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru khususnya dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Dengan dasar hukum, kegiatan PKB mendorong guru untuk memelihara pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh di awal, selanjutnya meningkatkan standar mereka secara keseluruhan mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi (Sudarma, 2011: 2).

Pembinaan profesional guru sangat identik dengan supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran adalah semua usaha yang sifatnya membantu guru agar dapat memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya serta mengkondisikan belajar murid yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan peningkatan mutu pendidikan. Pembinaan ini kegiatannya adalah mirip dengan supervisi seperti inspeksi, penilaian, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Iklim yang kondusif untuk pembinaan profesionalitas guru perlu diciptakan oleh seluruh warga sekolah baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, guru, karyawan dan seluruh siswa (Soetjipto, 2007: 231).

Profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang dietakuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan secara efektif dan efisien serta berhasil guna (Kunandar, 2008: 45).

Pekerjaan yang bersifat profesional, seperti guru, memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal (Usman, 2008: 14).

Salah satu tugas penting dari sebuah lembaga pendidikan adalah menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu bagi para peserta didiknya. Proses pendidikan akan dapat berjalan dengan baik apabila dalam pengaturan dan penyelenggaraan manajemen sekolah kepala sekolah memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Kegiatan inti pada sekolah yaitu

kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan proses implementasi dari kurikulum pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Hal yang paling mendasar dalam pembelajaran adalah adanya kegiatan siswa beserta aktifitasnya. Dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien perlu melibatkan siswa secara aktif (Ramli, 2010: 1).

Profesionalisme guru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini diperlukan orang-orang yang memang benar-benar ahli di bidangnya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. Profesionalisme tidak hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan jaman, tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia. Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetensi yang memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk melaksanakan sebuah tugas (Tika, 2011: 3).

Untuk meningkatkan profesionalisme guru diperlukan wadah yang jelas dan tepat dalam struktur organisasi profesi Guru. Organisasi profesi keguruan di jelaskan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 41 dijelaskan bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independent dan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan

kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi (Wibowo, 2011: 1).

Berdasarkan dua batasan tersebut, maka organisasi profesi di Indonesia ini tidak hanya memprioritaskan memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat tetapi perkembangan individu (siswa) sebagai pribadi yang unik secara utuh. Oleh karena setiap satuan pendidikan harus memberikan layanan yang dapat memfasilitasi perkembangan pribadi siswa secara optimal berupa pengajaran kelas, Pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesi keguruan juga harus di prioritaskan. Hal ini merupakan bagian dari kompetensi yang juga harus dikuasai oleh siswa.

Organisasi profesi guru saat ini sudah mulai tumbuh layaknya jamur di musim hujan. Jika pada era Orde Baru (Orba) bicara guru pasti *inheren* dengan PGRI. Guru sinonimnya adalah PGRI atau sebaliknya. Bahkan secara politis pun guru dan organisasi profesi guru yang bernama PGRI ini dimobilisasi bahkan dikooptasi oleh rezim. Sudah pengetahuan umum jika mobilisasi politik penguasa, dilakukan pada guru dan PGRI untuk memilih partai berkuasa saat itu (Golkar). Namun setelah reformasi, lahirnya UU Sisdiknas diperkuat oleh UU Guru dan Dosen (UU GD) yang terlahir kemudian, guru diwajibkan aktif dalam suatu wadah organisasi profesi yang tidak tunggal. Berbagai organisasi profesi guru seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Republik Indonesia

(PGRI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Hal ini menunjukkan bahwa wadah organisasi profesi guru bukan lagi monopoli Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI telah menjadi organisasi profesi guru yang mapan dan telah kokoh. Baik secara finansial maupun secara organisasional (Setriwan, 2010: 1).

Walaupun berbagai wadah organisasi profesi guru, namun sebagai forum profesional guru mata pelajaran, guru bergabung dalam wadah MGMP yang berada pada suatu wilayah kabupaten sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMK Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun Swasta dan atau guru tidak tetap/honorarium. Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan "dari, oleh, dan untuk guru" dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga lain (Mangkoesapoetra, 2009: 2).

[MGMP](#) merupakan wadah yang tepat untuk memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan masalah [pembelajaran](#) di kelas. [Guru](#) harus berusaha menciptakan suasana [pembelajaran](#) yang aktif, [inovatif](#), kreatif, efektif, dan menyenangkan,” tegas Kadinas. “Jangan pernah merasa bangga menjadi [guru](#) galak yang kesehariannya hanya marah-marah kepada peserta didik,” lanjutnya disambut aplaus para peserta. Kadinas juga menekankan pentingnya pengembangan [pendidikan karakter](#) dalam [pembelajaran](#) dengan

mengintegrasikannya ke dalam materi yang relevan. Mata pelajaran [bahasa Indonesia](#), katanya, merupakan mata pelajaran yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik (Tuhusetya, 2011: 2).

Tujuan diselenggarakannya MGMP ialah: Pertama, untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional; Kedua, untuk menyatakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan; Ketiga, untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya; Keempat, untuk membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan; Kelima, saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, *classroom action research*, referensi, dan lain-lain kegiatan profesional yang dibahas bersama-sama; Keenam, mampu menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (*school reform*), khususnya focus classroom reform, sehingga berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif (As'ari, 2011: 5).

Pembinaan profesionalisme Guru di SMK Negeri 9 Surakarta, dilakukan dengan berbagai cara, pembinaan melalui wadah profesi dilakukan oleh guru dalam bentuk kegiatan MGMP, secara internal pembinaan profesionalisme guru dilakukan oleh MGMP intern, maupun pembinaan melalui supervisi klinis oleh kepala sekolah. Melalui pembinaan-pembinaan tersebut dalam melakukan interaksi pembelajaran dengan siswa semakin meningkat.

Berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru baik secara internal maupun eksternal, ternyata masih banyak hambatan, untuk pembinaan guru secara eksternal dalam wadah MGMP, sering terjadi mis komunikasi yang disebabkan kurangnya koordinasi Pengurus, Pembinaan secara internal, kesibukan kepala sekolah merupakan kendala dalam pelaksanaan pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan dikaji karakteristik pembinaan pengelolaan pembinaan profesionalisme guru, dalam penelitian yang berjudul: “Pembinaan Kompetensi Sosial Dan Kompetensi Kepribadian Dalam Kerangka Profesionalisme Guru (Studi Situs Di SMK Negeri 9 Surakarta)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik: “Pembinaan Kompetensi Sosial Dan Kompetensi Kepribadian Dalam Kerangka Profesionalisme Guru (Studi Situs Di SMK Negeri 9 Surakarta)”. Fokus tersebut dibagi dalam 3 (tiga) sub fokus yaitu.

1. Bagaimana Karakteristik strategi pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta?
2. Bagaimana Karakteristik pembinaan kompetensi sosial guru di SMK Negeri 9 Surakarta?
3. Bagaimana Karakteristik pembinaan kompetensi kepribadian guru di SMK Negeri 9 Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dalam penelitian seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan karakteristik strategi pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta.
2. Mendeskripsikan karakteristik pembinaan kompetensi sosial guru di SMK Negeri 9 Surakarta.
3. Mendeskripsikan karakteristik pembinaan kompetensi kepribadian guru di SMK Negeri 9 Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai tambahan literatur pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya pada program Magister Manajemen Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan kajian tentang sistim pelaksanaan pengelolaan pembinaan peningkatan kompetensi profesionalisme guru, dan sebagai bahan masukan dalam memilih strategi pembinaan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian dalam kerangka profesionalisme Guru.

b. Manfaat bagi sekolah

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan program kerja dalam rangka pengelolaan pembinaan peningkatan profesionalisme guru, khususnya pembinaan kompetensi sosial dan kepribadian sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki profesionalitas guru khususnya kompetensi sosial dan kepribadian.

c. Manfaat bagi peneliti berikutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian dan kajian lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontribusi wacana keilmuan tentang pengelolaan pembinaan profesionalisme guru, khususnya kompetensi sosial dan kepribadian.

E. Daftar Istilah

1. Pembinaan adalah semua usaha yang sifatnya membantu kepada seseorang agar dapat memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan

kemampuannya, melalui kegiatan inspeksi, pengawasan, monitoring dan evaluasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Profesionalisme adalah merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana atau dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya dengan dilandasi pendidikan dan ketrampilan yang dimilikinya.
3. Guru adalah merupakan jabatan seseorang atau profesi pekerjaan yang memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus di bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan kemampuan maksimal.
4. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
5. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personil yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.